
MEREKONSTRUKSI PARADIGMA PEMBANGUNAN: BATASAN DAN RELEVANSI TEORI PEMBANGUNAN KONVENSIONAL DI MASYARAKAT MAYORITAS MUSLIM

Vathimatuz Zahroh¹, M.F. Hidayatullah²

^{1,2}Ekonomi Syariah, FEBIS, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Email: vathimzahroh@gmail.com

Abstrak

Teori pembangunan konvensional telah menjadi paradigma dominan dalam perumusan kebijakan pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk negara mayoritas Muslim. Namun, orientasinya yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan akumulasi modal sering kali dinilai belum mampu menjawab persoalan ketimpangan sosial, keadilan distributif, serta kebutuhan pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan keterbatasan teori pembangunan konvensional dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim serta merumuskan arah rekonstruksi paradigma pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang mencakup buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah terkait teori pembangunan, ekonomi Islam, modernisasi, ketergantungan, dan pertumbuhan ekonomi. Analisis dilakukan melalui sintesis teoritis terhadap berbagai perspektif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pembangunan konvensional, khususnya teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pertumbuhan neoklasik, masih memiliki relevansi dalam menjelaskan proses transformasi ekonomi, industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pentingnya inovasi teknologi. Namun, teori-teori tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung berlandaskan paradigma sekular dan materialistik yang mengabaikan dimensi spiritual, moral, dan keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, pembangunan tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan holistik (falah) melalui keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi paradigma pembangunan perlu dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka pembangunan modern sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang inklusif, adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Pembangunan Ekonomi, Teori Pembangunan Konvensional, Ekonomi Islam, Masyarakat Mayoritas Muslim.*

PENDAHULUAN

Ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi terapan yang relatif muda, Lahir hampir dua abad setelah ilmu ekonomi konvensional (1776). Secara ekonomi, pembangunan sering dipandang sebagai perluasan skala dan jangkauan aktivitas ekonomi. Fokus utamanya terletak pada peningkatan kapasitas produksi baik yang sudah berjalan maupun yang bersifat potensial. Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan ekonomi pembangunan (*development economics*) sering dianggap memiliki makna yang sama, padahal keduanya berbeda. Pembangunan ekonomi merujuk pada proses peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemakmuran suatu negara atau daerah, sedangkan ekonomi pembangunan merupakan bidang ilmu yang mengkaji proses tersebut. Dalam praktiknya, paradigma pembangunan ekonomi konvensional masih banyak berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yaitu peningkatan kapasitas

produksi yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat. (Huda, 2017).

Paradigma konvensional umumnya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai ukuran utama pembangunan, sedangkan ekonomi Islam memandang pembangunan secara lebih komprehensif dan multidimensional, mencakup aspek material, sosial, moral, dan spiritual. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi penting tetapi tidak cukup jika tidak diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan keadilan distribusi. Oleh karena itu, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat namun kesenjangan juga melebar, negara perlu menerapkan kebijakan redistributif berbasis prinsip keadilan, seperti optimalisasi zakat, wakaf produktif, perlindungan sosial, serta penguatan akses ekonomi bagi kelompok rentan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Kebangkitan Islam merupakan bentuk kritik dan keterlibatan aktif para pemikir serta aktivis Muslim terhadap modernitas, di mana keduanya saling membentuk dan mengubah satu sama lain. Hubungan ini terbagi ke dalam tiga periode evolusi yang berbeda: Periode pertama, Berfokus pada perdebatan seputar kapitalisme, komunisme, dan pembangunan politik pasca-kolonial di era Perang Dingin. Periode kedua Menekankan pada isu demokrasi, pembangunan ekonomi, dan hak asasi manusia. Periode ketiga (saat ini), Berfokus pada keterlibatan sipil dan hak-hak kewarganegaraan. (Sinanović, 2012). Melalui ketiga tahapan tersebut, gerakan Kebangkitan Islam mengalami transformasi yang signifikan, berevolusi dari gerakan yang awalnya cenderung reaktif di masa lalu menjadi gerakan yang lebih proaktif di masa kini.

Pendekatan pembangunan konvensional berfokus pada perluasan skala ekonomi dengan asumsi bahwa peningkatan produksi barang dan jasa secara otomatis akan mengangkat standar hidup Masyarakat (Abdoellah & Mulayanto, 2019). Teori pembangunan konvensional lahir pasca Perang Dunia II sebagai respons atas kemerdekaan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada masa tersebut, negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Eropa berupaya menyusun kerangka teoretis untuk membimbing negara-negara yang dianggap "terbelakang" menuju kemajuan. Namun, pendekatan seperti teori modernisasi dan neoliberalisme ini sering kali dikritik karena sifatnya yang Eurosentris. Artinya, teori-teori tersebut menjadikan pengalaman sejarah, nilai-nilai, dan standar keberhasilan Eropa sebagai ukuran universal yang dipaksakan untuk menjelaskan serta mengarahkan perkembangan seluruh masyarakat di dunia. (Talib, 2025). Banyak negara mayoritas Muslim yang mengadopsi model pembangunan Barat secara mentah-mentah justru menghadapi masalah struktural. pelaksanaan pembangunan, melainkan akibat adanya ketimpangan mendasar antara skema yang diterapkan dengan realitas sosial, ekonomi, serta nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena sebagian besar model Barat berpijak pada asumsi universal bahwa setiap negara mampu melewati tahapan industrialisasi yang identik dengan sejarah kemajuan negara-negara Barat, tanpa mempertimbangkan konteks unik tiap bangsa. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh teori modernisasi seperti yang dikemukakan Teori modernisasi yang dipelopori oleh Talcott Parsons, Walt Whitman Rostow, dan Marion Levy menjadi paradigma dominan pada era 1950-1960-an, dengan asumsi bahwa seluruh masyarakat akan melewati tahapan

perkembangan yang sama menuju modernitas.(Bulanov et al., 2026). Namun dalam praktiknya, banyak negara mayoritas Muslim memiliki karakteristik sosial yang berbeda seperti Struktur ekonomi yang masih berbasis pertanian dan peran komunitas dengan system yang dipengaruhi oleh norma islam. (Aulia Saraswaty, 2026).

Salah satu akar masalah struktural di negara-negara mayoritas Muslim yang menerapkan model pembangunan Barat adalah adanya benturan nilai yang fundamental. Ketegangan ini muncul karena paradigma Barat cenderung menitikberatkan pada aspek materialisme, yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai spiritualitas Islam. Sedangkan dalam perspektif Islam pembangunan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan kekayaan material, tetapi juga sebagai proses mewujudkan keseimbangan antara kesejahteraan dunia dan akhirat, yang mencakup transaksi ekonomi (larangan riba), distribusi kekayaan (zakat/wakaf), dan etika lingkungan. (Nasution et al., 2023). Meskipun agama dapat menjadi pendorong pembangunan melalui penguatan modal sosial, pembentukan etos kerja, redistribusi kekayaan, legitimasi keadilan, dan penguatan budaya; ia juga berpotensi menjadi penghambat kemajuan apabila diiringi oleh konservatisme kaku, politisasi identitas, serta resistensi terhadap inovasi.(Mulyaden et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kritis terhadap teori pembangunan konvensional bertujuan untuk mengkaji relevansi dan keterbatasan teori pembangunan konvensional dalam masyarakat mayoritas Muslim serta merumuskan paradigma pembangunan alternatif berbasis nilai-nilai ekonomi Islam yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan holistik.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pembangunan Konvensional

Teori pembangunan konvensional berkembang pesat setelah Perang Dunia II sebagai upaya menjelaskan proses transformasi negara-negara berkembang menuju kemajuan ekonomi. Salah satu teori yang dominan adalah Teori Modernisasi yang berpandangan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui transformasi sosial, industrialisasi, rasionalisasi, dan adopsi nilai-nilai modern sebagaimana dialami negara-negara Barat. Menurut Rostow, pembangunan berlangsung melalui tahapan yang berujung pada masyarakat dengan tingkat konsumsi massal yang tinggi. Sebagai kritik terhadap modernisasi, Teori Ketergantungan menjelaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan disebabkan oleh kegagalan internal, melainkan oleh struktur ekonomi global yang menciptakan hubungan ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang. Sementara itu, Teori Pertumbuhan Neoklasik menekankan pentingnya akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, teori-teori tersebut sering dikritik karena terlalu berorientasi pada indikator ekonomi material dan kurang memperhatikan aspek distribusi kesejahteraan, keadilan sosial, serta nilai-nilai budaya dan agama.

Paradigma Pembangunan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memandang pembangunan sebagai proses yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (*falah*), baik dalam dimensi material maupun spiritual. Berbeda dengan paradigma konvensional yang berfokus pada

pertumbuhan ekonomi, pembangunan dalam Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan, pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

Konsep pembangunan Islam berlandaskan pada prinsip *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga dari terciptanya keadilan distribusi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, serta terpeliharanya nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat.

Relevansi dan Keterbatasan Teori Pembangunan Konvensional di Negara Mayoritas Muslim

Dalam konteks negara mayoritas Muslim, teori pembangunan konvensional masih relevan dalam mendorong industrialisasi, peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi teknologi. Namun, paradigma tersebut memiliki keterbatasan karena dibangun di atas asumsi sekular dan materialistik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Negara mayoritas Muslim memerlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara instrumen pembangunan modern dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan holistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research), dengan memadukan berbagai kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan tema permasalahan. Dan juga membandingkan pendapat para ahli serta fenomena dan realitas perkembangan ekonomi yang ada yang bertujuan menyusun sintesis teoritis tentang teori Pembangunan Konvensional dan memaparkan sejauh mana keterbatasan dan relevansi bagi Negara dengan Mayoritas Muslim (Kusumastuti et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada analisis dan pengembangan kerangka konseptual berdasarkan literatur yang ada, bukan pada pengumpulan data empiris lapangan. studi Pustaka memungkinkan peneliti untuk melakukan meta analisis terhadap berbagai perspektif teoritis dan temuan penelitian sebelumnya, guna untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan integratif. sumber data dari penelitian terdiri dari 3 buku, 10 jurnal meliputi sumber berupa karya klasik tentang teori pembangunan, serta karya-karya teoretikus modernisasi seperti W.W. Rostow, dan sumber artikel jurnal internasional bereputasi yang terindeks dalam database seperti; scopus, Index Copernicus International (ICI), WoS, DOAJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep "Baratisasi" atau westernisasi sering kali dipandang sebagai jalur pintas menuju kemajuan, namun dalam realitas sosiologis, penerapan budaya Barat ini tidak selalu mulus, sering kali muncul kegagalan sistemik karena tidak selaras dengan struktur masyarakat lokal. Teori Modernisasi muncul dengan argumen bahwa kunci utama pembangunan terletak pada transformasi manusia dan nilai-nilai budayanya. Teori inilah

yang kemudian menjadi kerangka kerja dominan dalam menganalisis dan menjalankan agenda pembangunan di Indonesia (Gumelar & Qomar, 2025). Teori ini muncul pada 1950an dan 1960-an, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan Marshall Plan di Eropa. Inti argumennya adalah bahwa negara berkembang harus mengikuti jejak negara Barat untuk mencapai kemajuan.

Di Indonesia, Teori Modernisasi tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi telah menjelma menjadi paradigma utama dalam memandang persoalan pembangunan. Penerapan teori ini didorong oleh koalisi pemikiran antara kelompok intelektual dan pemegang kebijakan. Teori ini sering dianggap "anti-agama" karena memandang sekularisasi sebagai syarat mutlak kemajuan.(Anggraini, 2022). Selain itu, teori ini mengabaikan bahwa kemiskinan sering kali disebabkan oleh faktor eksternal. Namun, dominasi Teori Modernisasi tersebut tidak lepas dari kritik tajam, terutama dari para pemikir yang melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Berseberangan dengan pandangan bahwa masalah utama terletak pada nilai budaya lokal, kelompok ini berargumen bahwa keterbelakangan negara berkembang bukanlah akibat dari kurangnya upaya untuk menjadi modern. Teori Ketergantungan (Dependency Theory) lahir sebagai kritik terhadap Teori Modernisasi, teori ini muncul pada 1960–1970an (Indonesia, 2023). Para pemikir teori ini berpendapat bahwa ketertinggalan negara berkembang bukan karena kurang modern, tetapi karena posisi mereka dalam struktur ekonomi global yang tidak adil. teori ini menjelaskan menjelaskan bahwa sistem ekonomi dunia terbagi menjadi dua kelompok: pertama, negara maju yang menguasai teknologi, industri, dan keuangan global. Kedua, negara berkembang yang menjadi pemasok bahan mentah dan pasar bagi produk industri negara maju (Wahyuni et al., 2025). Hubungan antara keduanya bersifat eksploitatif, sehingga membuat negara pinggir terus terjebak dalam utang dan ketergantungan teknologi. Akibatnya, negara berkembang sulit mencapai kemandirian ekonomi.

Neoclassical Growth Theory (Teori Pertumbuhan Neoklasik) Berbeda dengan debat sosiologis sebelumnya, teori Ini lebih berfokus pada faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan output jangka panjang. Melalui Model Solow-Swan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga factor yaitu: akumulasi modal, tenaga kerja dan kemajuan teknologi.(Adipathy & Armunanto, 2025). Namun, Neoklasik sering mengabaikan aspek distribusi kekayaan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (PDB) bisa terjadi bersamaan dengan kesenjangan sosial yang ekstrem. Akibatnya, meskipun sebuah negara tampak "maju" secara statistik, manfaat ekonominya tidak tersebar merata, yang pada akhirnya justru memperlebar jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin di dalam negeri.

Sekularisme dalam konteks teori pembangunan dipandang sebagai proses rasional yang murni bersifat keduniawian, sehingga terjadi pemisahan tegas antara nilai-nilai agama dengan proses pengambilan keputusan di ranah ekonomi, politik, dan sosial. Pembangunan dianggap sebagai proses rasional yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh norma-norma spiritual atau keagamaan.(Mulyaden et al., 2026). Indikator keberhasilan pembangunan sepenuhnya disandarkan pada angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat industrialisasi yang terukur secara empiris. Pandangan sekularistik yang memisahkan pembangunan dari nilai spiritual tersebut secara alami bermuara pada materialisme, sebuah paradigma yang meletakkan kesejahteraan manusia sepenuhnya pada dimensi fisik dan kebendaan.

Paradigma ini menganggap bahwa kemajuan ekonomi material merupakan indikator utama kesejahteraan masyarakat. (Eko Kristianto, 2022). Pendekatan ini terlihat dalam teori pertumbuhan seperti yang dikembangkan oleh Robert Solow, di mana fokus utama diarahkan pada optimalisasi modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk terus memacu output ekonomi. Dalam hal ini keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari kedalaman makna hidup atau keharmonisan sosial, melainkan dari akumulasi aset dan kapasitas produksi yang kasat mata.

Ruang adaptasi dan integrasi nilai Islam dalam konteks teori pembangunan konvensional (yang berasumsi sekular dan materialistik) dapat dipahami sebagai upaya mereformulasi paradigma pembangunan agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan keadilan sosial yang menjadi prinsip dalam Islam. Bukan berarti teori konvensional atau konsep pembangunan modern ditolak secara total, namun melakukan penyesuaian nilai agar pembangunan tetap relevan dengan prinsip syari'ah. Dalam perspektif Islam, pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga mencapai kesejahteraan (Uswatun, 2024).

Dari teori Modernisasi yang mencoba mengubah budaya manusia, dan teori Neoklasik hanya fokus pada angka. Tanpa memperhatikan Struktur Ekonomi (seperti yang dibahas sebelumnya), pertumbuhan ekonomi hanyalah kemajuan semu yang tidak menyentuh keadilan sosial. Relevansi Dalam teori modernisasi yaitu terletak pada Aspek disiplin, rasionalitas yang efisien dalam modernisasi tetap dibutuhkan. Aspek ini menjadi salah satu dorongan untuk bekerja secara profesional dan terorganisir. Teori ini membantu menjelaskan bahwa Transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Bagi negara dengan mayoritas muslim pentingnya mengelola sumber daya alam agar tidak terjebak dalam eksploitasi global. Teori ketergantungan ini membantu dalam menyadari esensial kemandirian ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya mereka sendiri. Instrumen dalam Teori Pertumbuhan Neoklasik melalui model solow-swan seperti akumulasi modal, pengembangan sumber daya manusia (tenaga kerja), dan inovasi teknologi tetap menjadi mesin penggerak ekonomi yang valid.

Dalam teori pembangunan konvensional banyak dipengaruhi oleh paradigma sekular dan materialistik, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan material sebagai tujuan utama pembangunan. Pendekatan tersebut juga mendapat kritik karena cenderung mengabaikan dimensi spiritual, moral, dan keadilan sosial dalam pembangunan. Oleh karena upaya untuk mengintegrasikan dimensi material dan spiritual agar pembangunan dapat menghasilkan kesejahteraan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam konteks negara mayoritas Muslim, teori Pembangunan konvensional cukup relevansi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan transformasi institusi. Namun memiliki keterbatasan secara teologis, karena bagi masyarakat Muslim, materi hanya sebagai sarana bukan tujuan akhir. Dengan melakukan proses adaptasi dan integrasi dengan nilai-nilai Islam pembangunan dapat diarahkan tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang holistik (falah) yang mencakup dimensi material, sosial, dan spiritual.

KESIMPULAN

Teori pembangunan konvensional telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan proses pembangunan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, akumulasi modal, pengembangan sumber daya manusia, dan kemajuan teknologi. Teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pertumbuhan neoklasik masih memiliki relevansi dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk negara mayoritas Muslim.

Namun demikian, teori-teori tersebut memiliki sejumlah keterbatasan. Paradigma pembangunan konvensional cenderung berorientasi pada aspek material dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, sehingga kurang memperhatikan dimensi spiritual, moral, serta keadilan sosial. Akibatnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim, pendekatan tersebut sering kali kurang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan pembangunan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Perspektif ekonomi Islam menawarkan paradigma pembangunan yang lebih komprehensif melalui integrasi antara dimensi material dan spiritual. Pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pendapatan dan produksi, tetapi juga pada pencapaian keadilan, pemerataan, keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik (falah). Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma pembangunan diperlukan dengan mengadaptasi unsur-unsur positif dari teori pembangunan konvensional dan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam agar pembangunan menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdoellah, O. S., & Mulayanto, D. (2019). *Isu-isu pembangunan: Pengantar teoritis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Adipathy, D. A., & Armunanto, Y. N. (2025). Penerapan Model Solow: Kontribusi Modal dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(2), 382–394.
- Anggraini, R. D. (2022). Analisis Konsep Sekularisasi Ditinjau dari Perspektif Nurcholish Madjid. *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*, 147.
- Aulia Saraswaty, S. P. (2026). *Teori Dan Pendekatan Pembangunan. Pengantar Perencanaan Pembangunan*, 13.
- Bulanov, A., Zahra, S. A., & Hamdi, Z. (2026). History and Theory of Development Sociology. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(10), 335–339.
- Eko Kristianto, P. (2022). Perjalanan Maraton Menuju 2030: Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme. *Jurnal Dekonstruksi*, 6(1), 233–266.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). *Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia*. Naafi: Jurnal Ilmiah

Mahasiswa, 2(2), 260–269.
<https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.149>

Huda, N. (2017). Ekonomi pembangunan islam. Prenada Media.

Indonesia, B. N. S. (2023). PRO: Teori Ketergantungan Menciptakan Ketidakadilan. Pro Kontra Pro Kontra Isu Pembangunan Isu Pembangunan, 20.

Kusumastuti, S. Y., Anggraeni, A. F., Rustam, A., Desi, D. E., & Waseso, B. (2025). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Mulyaden, A., Abidin, Y. Z., Kusnawan, A., & Zuldin, M. (2026). Hubungan Agama dan Pembangunan: Analisis Kritis terhadap Teori Modernisasi, Etika Protestan, dan Pembangunan Berkelanjutan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 3716–3729.

Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Journal of Management and Creative Business, 1(1), 63–71.

Sinanović, E. (2012). Islamic revival as development: discourses on Islam, modernity, and democracy since the 1950s. Politics, Religion & Ideology, 13(1), 3–24.

Talib, N. M. (2025). Naratif Barat dan Interpretasi Timur: Evolusi Eurosentrisme dalam Kajian Orientalis. International Journal of World Civilizations and Philosophical Studies, 3(3).

USWATUN, H. (2024). Analisis Peran Dana Desa Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunt Kabupaten Pesisir Barat). UIN Raden Intan Lampung.

Wahyuni, A., Marentek, C., & Sarunggaga, H. (2025). Ketergantungan Industri Otomotif Jepang di Indonesia: Analisis PolitikKetergantungan Struktural. Jurnal Inovasi Politik Indonesia, 1(1), 1–11.